BAB II
PEMBAHASAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat PT Telekomunikasi Indonesia

PT Telekomunikasi Indonesia yang dikenal dengan nama TELKOM berasal dasi suatu badan usaha yang bernama *Post-en Telegraafdlenst* yang didirikan dengan Staatsblad No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia Belanda pada waktu itu pada mulanya diselenggarakan oleh swasta. Bahkan sampai tahun 1905 tercatat 35 perusahaan telekomunikasi, yang pada tahun 1906 diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan Staatsblad No. 395 tahun 1906. Semenjak itu berdiri *Post Telegraraaf en Telefoondiest* atau disebut PTT-Dienst. Kemudian PTT-Dienst ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan Staatsblad No. 419 tahun 1927 tentang *Indonesia Bedrijven Wet* (I.B.W, Undang-Undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik Indonesia tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara (PN). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan bahwa Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 B, dilebur kedalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN. Pos dan Telekomunikasi).

Dalam Perkembangan selanjutnya pemerintah memandang perlu untuk membagi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi menjadi dua Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, maka berdirilah Perusahaan Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN. Telekomunikasi) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Bentuk inipun dikembangkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi melalui Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan pula perusahaan umum telekomunikassi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi untuk umum, baik

hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Hubungan telekomunikasi luar negeri saat ini juga diselenggarakan oleh PT Indonesian Satelite Corporation (Indosat) yang masih berstatus perusahaan asing, yakni suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundangan Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat

Seluruh saham PT Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dari Amerika Cable & Radio Corporation. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980, Perumtel ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi untuk internasional.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan industri jasa telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan yang lebih profesional, oleh karena penyesuaian perusahaan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991 bentuk Perusahaan Umum (Perum) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969. Semenjak itulah berdiri Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia atau TELKOM. Sebagai gambaran, lebih jelasnya dibawah ini diringkas perubahan-perubahan yang terjadi sebelum menjadi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero).

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Tabel 2.1

Perubahan-Perubahan sebelum menjadi

PT. Telekomunikasi Indonesia

TAHUN	BENTUK LAMA	BENTUK BARU
1906	POST EN TELEGRAF DIENST	POST TELEGRAF & TELEPOON DIENST
1931	PERUSAHAAN JAWATAN POS, TELEGRAF, TELEPOON DIENST	PN. POSTEL
1965	PN. POSTEL	~ PN. POS & GIRO ~PN. TELEKOMUNIKASI
1974	PN. TELEKOMUIKASI	~ PERUMTEL ~ PT. INTI
1980	PERUMTEL	~ PERUMTEL ~ PT. INDOSAT
1991	PERUMTEL	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
1995	PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

2.2 Sejarah Singkat Divisi Regional III

Pada bulan Oktober 1950, wilayah Indonesia dibagi menjadi 7 daerah inspeksi Dinas Pos dan Eksploitasi Telegrap serta 7 Daerah Inspeksi Telegrap (Dpt) masing-masing dipimpin oleh Kepala Daerah Inspeksi Dinas Pos dan Eksploitasi Telegrap (Kdpt), dan 7 daerah Inspeksi Teknik Telegrap, Teknik dan Eksploitasi Telepon (Kdtt) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Inspeksi Dinas Telegrap dan Eksploitasi Telepon (Kdtt). Adapun pembagian daerah inspeksi dimaksud adalah :

Daerah I : Meliputi seluruh daerah Pemerintahan Jawa Barat (termasuk D.K.I. Jakarta sekarang) dan Kalimantan Barat, dengan tempat kedudukan Kdpt & Kdtt di Jakarta.

Daerah II : Meliputi seluruh daerah Pemerintahan Jawa Tengah (termasuk D.I. Yogyakarta sekarang), dengan tempat kedudukan Kdpt & Kdtt di Semarang.

Daerah III : Meliputi seluruh daerah Pemerintahan Jawa Timur, Kalimantan Selatan (termasuk Kalimantan Tengah sekarang) dan Kalimantan Timur, dengan tempat kedudukan Kdpt & Kdtt di Surabaya.

Daerah IV : Meliputi seluruh daerah Pemerintahan Sumatera Selatan (termasuk Jambi, Bengkulu dan Lampung sekarang), pulau-pulau Bangka dan Belitung, dengan tempat kedudukan Kdpt & Kdtt di Palembang.

Daerah V : Melipti seluruh daerah Pemerintahan Sumatera Tengah dan Sumatera Barat dengan tempat kedudukan Kdpt & Kdtt di Padang.

Daerah VI : Meliputi seluruh daerah Pemerintahan Sumatera Utara, Sumatera Timur, Aceh dan Tapanuli dengan tempat kedudukan Kdpt & Kdtt di Medan.

Daerah VII : Meliputi Indonesia Timur, termasuk kepulauan Sunda Kecil, dengan tempat kedudukan Kdpt & Kdtt di Makasar (sekarang Ujung Pandang).

Pada akhir tahun 1951, terjadi perubahan nama :

Daerah Inspeksi Dinas Pos dan Eksploitasi Telegrap (Dpt) dan Kepala Daerah Inspeksi Dinas Pos dan Eksploitasi Telegrap (Kdpt) menjadi Daerah Inspeksi Pos dan Telegrap (Ispos) dan Kepala Daerah Inspeksi Pos dan Telegrap (Kispos).

Daerah Teknik Telegrap, Teknik dan Eksploitasi Telepon (Dtt) dan Kepala Daerah Teknik Telegrap, Teknik dan Eksploitasi Telepon (Kdtt) menjadi Daerah Inspeksi Telekomunikasi (Istel) dan Kepala Daerah Inspeksi Telekomunikasi (Kistel).

Distrik Radio ke I dan Kepala Distrik Radio ke I menjadi Inspeksi Radio Daerah ke I (Israd) dan Kepala Inspeksi Radio Daerah ke I (Kisrad) dan lokasi dipindahkan dari Jakarta ke Bandung.

Mulai tanggal 1 Agustus 1954 : Inspeksi Radio Daerah ke I dihapuskan, dan digabungkan dengan Wilayah Inspeksi Telekomunikasi ke I lalu dibagi menjadi dua daerah, yaitu :

1. Daerah Kepala Inspeksi Telekomunikasi ke I (bentuk baru) yang meliputi Jakarta Raya, Banten dan Kalimantan Barat dengan Jakarta sebagai tempat kedudukan.

UNIKOM

2. Daerah Kepala Inspeksi Telekomunikasi Daerah ke VIII (bentuk baru) yang meliputi seluruh Jawa Barat kecuali Jakarta Raya dan Banten dengan Bandung sebagai tempat kedudukan.

Mulai tanggal 1 Juli 1956, karena tidak sesuai lagi maka nama-nama jabatan tersebut diatas diubah menjadi Kepala Daerah Pos dan Telegrap (KDEPOS) dan Kepala Daerah Telekomunikasi (KDTEL).

2.3 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

PT. TELKOM DIVISI REGIONAL II Jawa Barat yang beralamat di Jalan Lembong No. 11-15 Bandung.

2.4 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No.25 Tahun 1991 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), status PERUMTEL diubah menjadi PT. TELKOM dan setelah Go Publik menjadi PT. TELKOM tbk.

2.5 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional, maupun regional, maka Telkom pada tahun 1995 melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan Kerja Sama Operasi (KSO) dan persiapan *go public*/Internasional atau dikenal dengan nama *Initial Public Offering*. Restukturisasi meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha PT TELKOM dibagi tiga, yaitu bidang usaha utama, bidang usaha terkait dan bidang usaha pendukung. Bidang usaha utama PT TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri, sedangkan bidang terkait termasuk Sistem Telepon Bergerak Selular (STBS), sirkit langganan, teleks, penyewaan tranponder, dan jasa nilai tambah tertentu.

Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan oleh PT TELKOM dan ada yang diselenggarakan bekerja dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan.

Sedangkan bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang utama dan bidang terkait, yang termasuk dalam bidang pendukung adalah pelatihan, sistem informasi, atelir, properti, riset teknologi informasi.

Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak 1 Juli 1995 PT TELKOM telah menghapuskan struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara de facto meresmikan dimulainya era Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional dan satu Divisi Network. Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional.
Divisi Regional TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

1. Divisi Regional I, meliputi wilayah Sumatera.
2. Divisi Regional II, meliputi wilayah Jakarta dan sekitarnya.
3. Divisi Regional III, meliputi wilayah Jawa Barat.
4. Divisi Regional IV, meliputi wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.
5. Divisi Regional V, meliputi wilayah Jawa Timur.
6. Divisi Regional VI, meliputi wilayah Kalimantan.
7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Masing-masing Divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah berdasarkan prinsip Desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan Divisi lainnya) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah. Sedangkan divisi-divisi pendukung terdiri dari Divisi Latihan, Divisi Properti, dan Divisi Sistem Informasi. Beralihnya kebijakan sistem sentralisasi ke kebijakan dekosentralisasi dan desentralisasi kewenangan, maka struktur dan fungsi Kantor Pusat juga mengalami perubahan. Berdasarkan organisasi Divisional ini, maka Kantor Pusat diubah menjadi Kantor Perusahaan yang semula sebagai pusat investasi disederhanakan menjadi pusat biaya *(cost center)*. Berlakunya kebijakan

dekosentrasi menjadikan jumlah sumber daya manusia Kantor Perusahaan juga menjadi lebih sedikit.

Kantor Perusahaan TELKOM berdasarkan akte perubahan yang terakhir berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung, bertanggung jawab atas penyampaian sasaran pengelolaan perusahaan melalui kegiatan unit kerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Divisi, Kantor Perusahaan hanyalah menetapkan hal-hal yang strategis, sedangkan penjabaran operasionalnya dilaksanakan oleh masing-masing Divisi.

Struktur manajemen TELKOM, secara garis besar meliputi Kantor Perusahaan, Divisi Regional I s.d VII, Divisi Network dan Divisi Pendukung. Kantor Perusahaan strukturnya sangat sederhana, hanya terdiri dari Dewan Direksi yang dibantu kelompok Pengembang Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Audit Internal, dan beberapa *Vice President*.

2.6 Bidang Pekerjaan Divisi-Divisi di PT TELKOM

Adapun ruang lingkup dari masing-masing Divisi dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.6.1 Divisi Network

Divisi yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Pelanggan *Divisi Network* utamanya adalah untuk kepentingan internal PT TELKOM, namun bila memungkinkan dapat melayani eksternal PT TELKOM.

2.6.2 Divisi Multimedia

Divisi Multimedia adalah Divisi PT TELKOM yang mengelola jasa multimedia dan *network provider* untuk melayani masyarakat, langganan dan internal PT TELKOM, *internet provider, corporate customers*. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan bisnis masa depan yang ditandai dengan adanya konvergensi telepon, televisi kabel (*Video Communications*) dan internet (*Computer Communication*).

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

2.6.3 Divisi Sistem Informasi

Divisi yang menyediakan sistem informasi, baik untuk kepentingan PT TELKOM maupun pihak lain. Produk-produk layanan yang dihasilkan seperti : *Software*, *Management Information System, Sistem Informasi Kastemer (SISKA), Billing, Corporate Database, Interkoneksi Billing* dan *Proses Telepon Selular.*

2.6.4 Divisi Riset Teknologi Informasi

Divisi yang melaksanakan riset dan pengembangan teknologi telekomunikasi untuk kepentingan internal PT TELKOM, baik riset pengembangan produk baru, standarisasi perangkat, *grand scenario technology* dan uji kaji laboratorium.

2.6.5 Divisi Properti

Divisi yang mengelola propertI seperti tanah, gedung, dan sarana lainnya milik PT TELKOM yang tidak berkaitan dengan alat produksi. Pengelolaan properti ini terutama untuk kepentingan PT TELKOM, namun bila memungkinkan dapat melayani pihak lain.

2.6.6 Divisi Atelir

Divisi yang berfungsi sebagai *Repair Centre* (Pusat Perbengkelan) bagi kepentingan PT TELKOM, meliputi : pengetesan dan modul repair, menyediakan suku cadang perangkat dan konsultasi teknis.

2.6.7 Divisi Pelatihan

Divisi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai PT TELKOM untuk menunjang terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan berintegrasi..

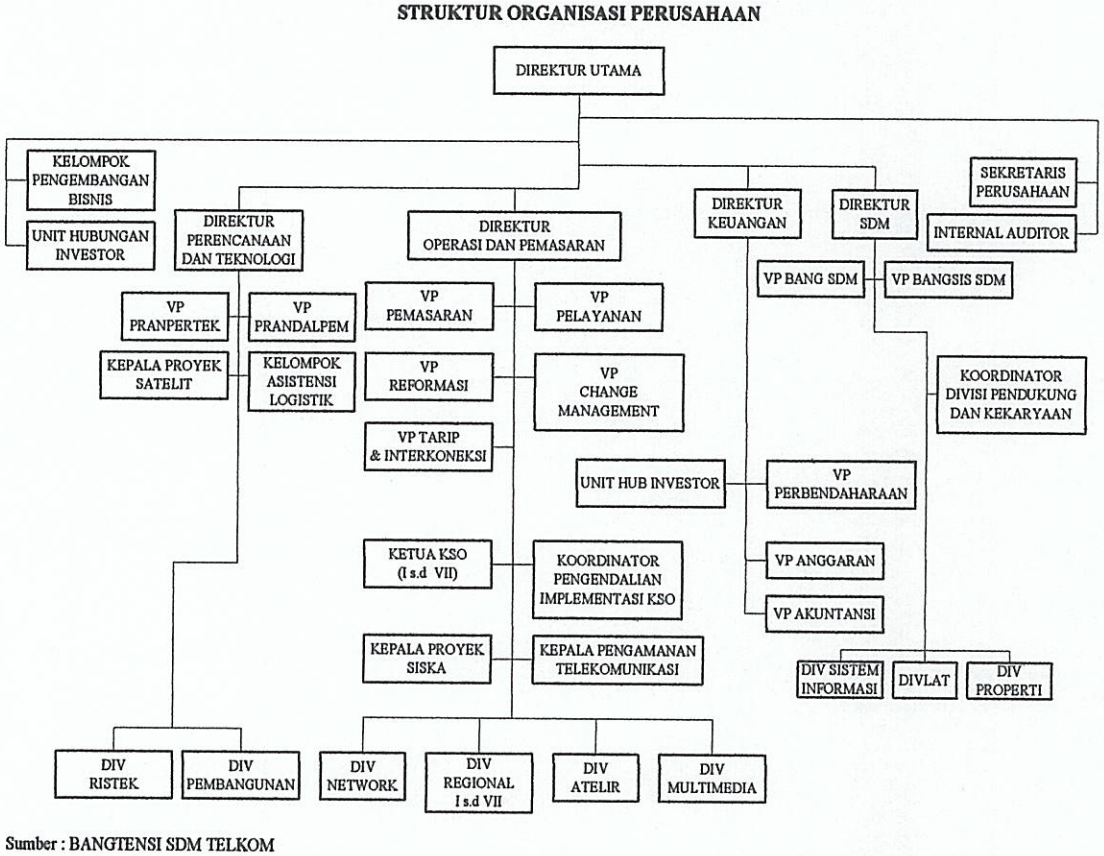
2.6.8 Divisi Pembangunan

Divisi yang melaksanakan pembangunan, konstruksi jaringan, konsultasi pembangunan, desain proyek dan pengadaan untuk kepentingan PT TELKOM. Divisi ini tidak menangani pembangunan yang menjadi tanggung jawab mitra KSO yang harus diselesaikan sampai akhir Repelita VI.

2.7 Struktur Organisasi PT TELKOM

Sebagai sebuah badan usaha milik negara yang sudah lama berdiri struktur organisasi PT TELKOM telah banyak mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut harus dapat diantisipasi oleh PT TELKOM agar dapat memenuhi perubahan tuntutan yang terjadi dengan cepat, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Bagan struktur organisasi PT TELKOM sebagai berikut :



Sumber : BANGTENSI SDM TELKOM

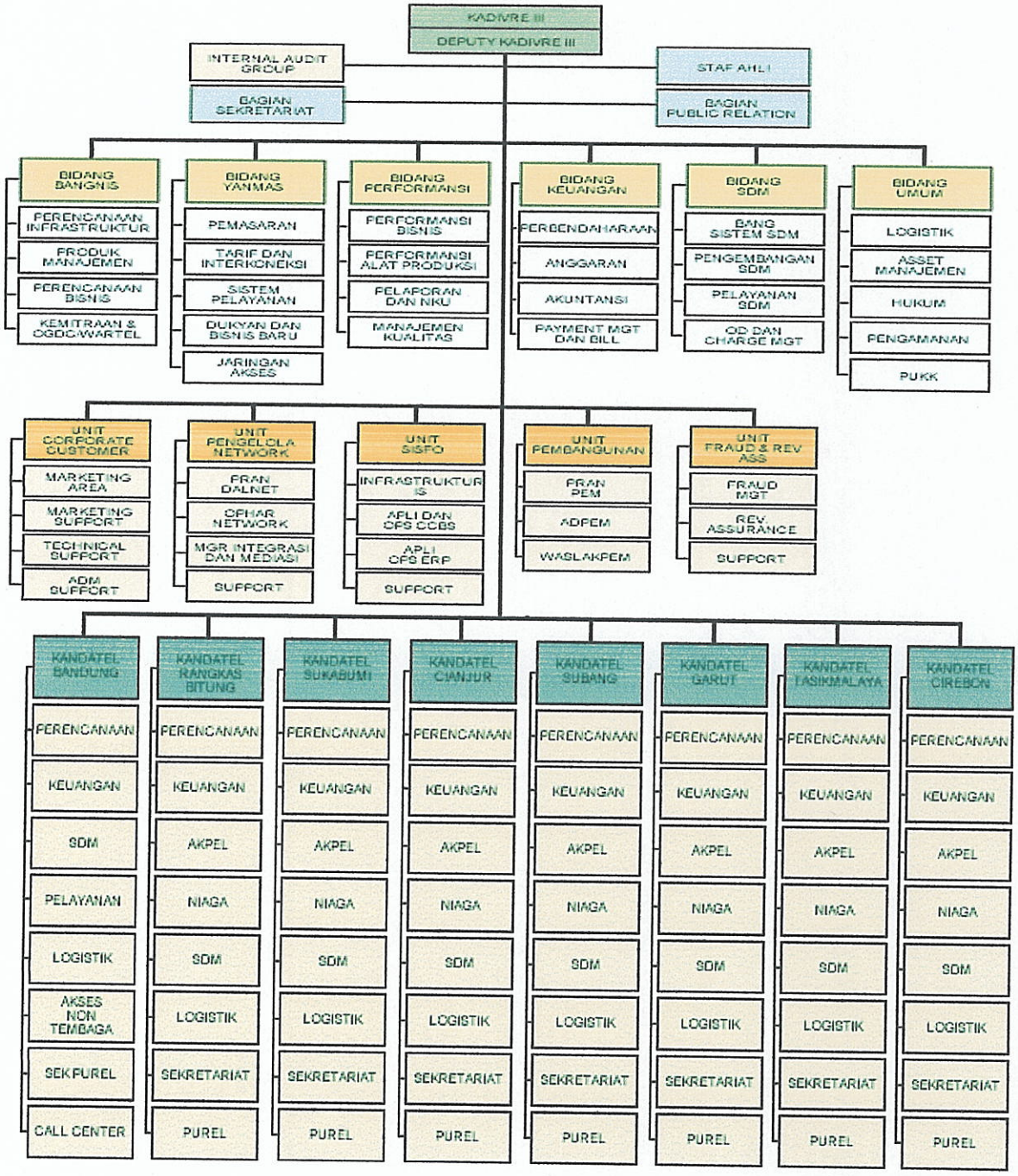
Gambar 2.1

Struktur Organisasi Perusahaan

Sebagai sebuah Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi yang berkedudukan dibawah Kantor Unit KSO Divisi Regional III, KANDATEL Bandung telah mengalami perubahan sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dan dinamika

lingkungan perusahaan dewasa ini, seperti tuntutan pemenuhan kebutuhan telekomunikasi masyarakat dan pelanggan, perubahan persepsi pelanggan ke arah pemenuhan kebutuhan, perkembangan teknologi telekomunikasi, yang menuntut pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

Perubahan yang terjadi tersebut harus dapat diantisipasi oleh KANDATEL Bandung agar dapat memenuhi tuntutan yang terjadi dengan cepat, dengan menitikberatkan pada pencapaian sasaran operasional sehingga tujuan operasional perusahaan lebih terjamin pencapaiannya.



Gambar 2.2 Stuktur Organisasi

DIVRE III


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM